

KERJASAMA INGGRIS-ARAB SAUDI DALAM BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN TAHUN 2014-2017

Fathan Adi Rahmanto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the United Kingdom-Saudi Arabia defense industry cooperation during 2014–2017, focusing on the political, economic, and security factors driving the relationship. Using a qualitative descriptive approach and the Neorealism framework, it highlights how the UK leverages arms exports to sustain its defense industry and maintain influence in the Middle East, while Saudi Arabia views arms procurement as a strategy to strengthen military capabilities amid regional conflicts, particularly in Yemen. The research also assesses the implications of the Arms Trade Treaty (ATT) on the UK's export practices, given allegations of human rights violations by Saudi Arabia. Findings reveal that despite international pressure to halt arms sales, the UK continues cooperation due to national interest considerations. These results reflect the ethical and strategic dilemmas in international relations when economic and security interests intersect with human rights norms.

Keywords: Defense Cooperation, United Kingdom, Saudi Arabia, Neorealism

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kerjasama Inggris-Arab Saudi dalam bidang industri pertahanan pada 2014–2017, dengan fokus pada faktor politik, ekonomi, dan keamanan yang mendorong hubungan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka teori Neorealisme, penelitian ini menyoroti bagaimana Inggris memanfaatkan ekspor senjata untuk menopang industri pertahanannya sekaligus mempertahankan pengaruh di Timur Tengah, sementara Arab Saudi memandang pembelian senjata sebagai strategi memperkuat kapabilitas militer di tengah eskalasi konflik, khususnya di Yaman. Penelitian ini juga mengevaluasi implikasi perjanjian perdagangan senjata internasional (Arms Trade Treaty/ATT) terhadap praktik ekspor Inggris, mengingat tuduhan pelanggaran HAM oleh Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan internasional untuk menghentikan penjualan senjata, Inggris tetap melanjutkan kerjasama karena pertimbangan kepentingan nasional. Temuan ini mencerminkan dilema etis dan strategis dalam hubungan internasional ketika kepentingan ekonomi dan keamanan bersinggungan dengan norma hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kerjasama Pertahanan, Inggris, Arab Saudi, Neorealisme

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Dingin telah mengakibatkan peningkatan trend industri produksi persenjataan konvensional di kawasan Eropa dan Amerika Utara, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap maraknya jual beli senjata ilegal. Dalam konteks ini, hubungan bilateral Inggris dan Arab Saudi dalam sektor perdagangan senjata menjadi topik yang sangat kontroversial dan penting dalam kajian politik internasional, ekonomi, dan keamanan global.

Pada tahun 2017, kerjasama penjualan senjata antara Inggris dan Arab Saudi mencapai titik puncaknya. Data dari Stockholm *International Peace Research Institute* (SIPRI) menunjukkan bahwa trend penjualan senjata konvensional global terus meningkat, dengan total penjualan pada tahun 2015 mencapai \$370,7 miliar (Fachriana, 2021). Inggris sebagai salah satu dari sepuluh negara pengeksport senjata terbesar dunia, berada di posisi keenam setelah Amerika Serikat, Rusia, China, Jerman, dan Prancis.

	2010	2011	2014	2015	2016	2017
Aircraft	11878	15254	11413	12799	12320	13887
Air defence	1081	1285	1257	1992	2500	1745
Armored vehicles	3916	3628	2869	2627	3908	3134
Artillery	775	719	266	301	292	222
Engines	1106	1160	1443	1532	1589	1436
Missiles	2632	3013	3218	3298	4447	4660
Naval Weapons	171	145	195	185	161	177
Other	328	284	163	193	110	140
Satellites					100	100
Sensors	1259	1477	1636	1798	1580	1141
Ships	2610	3078	4412	3912	4430	5119
Total	25757	30043	27073	28638	31438	31762

Tabel Data Penjualan Industri Pertahanan Negara-Negara

(Sumber: SIPRI. 2016. Trends in International Arms Transfers)

Arab Saudi menjadi pasar utama bagi ekspor senjata Inggris, menyerap lebih dari 46% total produksi senjata konvensional Inggris, diikuti India (11%) dan Indonesia (8,7%). Produk-produk unggulan yang diekspor meliputi pesawat tempur Typhoon Eurofighter, kapal selam Astute, helikopter Lynx, senjata laras panjang SA80, dan berbagai senjata konvensional lainnya. Ekspor senjata ini merupakan bisnis besar yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional Inggris, khususnya dalam sektor manufaktur dan industri pertahanan. Melihat fenomena perdagangan senjata yang tidak terkontrol dan dapat memperparah konflik internal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi pembentukan rezim perdagangan senjata melalui Perjanjian Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty*, ATT) pada 2 April 2013. ATT merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat untuk mengontrol dan menciptakan standar khusus terkait perdagangan senjata konvensional dunia, mencakup pengaturan ekspor, impor, dan transfer senjata. Inggris meratifikasi ATT pada 2 April 2014, bersama 85 negara lainnya (MOFA of Japan, 2014).

Situasi menjadi kompleks ketika Arab Saudi melakukan intervensi militer di Yaman pada tahun 2015. Konflik internal antara pemerintah Yaman dengan pemberontak Houthi yang memanas sejak Arab Spring 2010, mencapai eskalasi tinggi ketika kelompok Houthi berhasil menduduki pusat pemerintahan di Sana'a. Presiden Hadi kemudian melarikan diri ke Arab Saudi untuk mendapatkan dukungan politik, yang kemudian memicu intervensi koalisi Arab Saudi melalui serangan udara.

Data menunjukkan peningkatan dramatis dalam lisensi ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi. *Standard Individual Export Licenses* (SIELS) yang dikeluarkan mencapai 283 lisensi senilai £3,213 juta pada tahun 2017, meningkat lebih dari 180% dibandingkan tahun 2013 (£1,808 juta) dan 2011 (£2,007 juta) (Fachriana, 2021). Sejak dimulainya intervensi, Inggris telah menyuplai senjata konvensional senilai £1,75 triliun meliputi helikopter, pesawat tempur, tank dan instrumen lainnya.

Penggunaan senjata-senjata tersebut dalam operasi militer Arab Saudi di Yaman menimbulkan kritik keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan PBB karena terjadinya pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan terburuk. Beberapa negara Uni Eropa seperti Denmark, Jerman, dan Finlandia menghentikan pengiriman senjata ke negara-negara yang terlibat dalam Perang Yaman. Namun, Inggris tetap melanjutkan ekspor senjata, bahkan meningkatkan jumlah lisensi dari 124 lisensi (2014) menjadi 165 lisensi (2015). Pada 23 September 2015, Amnesty International melaporkan bahwa rudal buatan Inggris ditemukan telah menghantam pabrik keramik dan menelan korban jiwa sipil, yang semakin mempertegas tuduhan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional (Hendrik, 2018).

Situasi menjadi paradoks ketika di satu sisi Inggris terus meningkatkan ekspor senjata ke Arab Saudi, namun di sisi lain juga menjadi penyumbang bantuan kemanusiaan terbesar untuk Yaman dengan menghabiskan £139 juta hingga 2016. Inggris juga mengusulkan program '*Yemeni Youth in Conflict Resolution and Prevention*' dengan dana £120,000 dan menyerukan penghentian krisis kemanusiaan di Yaman melalui perwakilannya di Dewan Keamanan PBB. Keputusan pemerintah Inggris untuk tetap melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang terbukti melakukan operasi militer kontroversial di Yaman dapat diindikasikan telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 7 ayat 1 ATT. Pasal-pasal tersebut mengatur larangan penjualan senjata kepada pihak yang berpotensi menggunakan senjata untuk melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM.

Kerjasama penjualan senjata Inggris-Arab Saudi tahun 2017 ini mencerminkan kompleksitas hubungan internasional dalam industri pertahanan, sekaligus menguji konsistensi komitmen negara-negara terhadap instrumen hukum internasional dalam mengatur perdagangan senjata dan perlindungan hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan politik dapat berbenturan dengan kewajiban moral dan hukum internasional, serta menjadi studi kasus penting dalam memahami dinamika perdagangan senjata global di era modern.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan neorealisme atau realisme struktural, yang mana hal ini berkaitan dengan kondisi sistem internasional yang anarki dimana tidak ada otoritas supranasional yang mengatur di atas negara-negara, sehingga negara harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan

dan mencapai tujuan nasional mereka. Dalam neorealisme juga dijelaskan bahwa struktur internasional akan membentuk pilihan dari politik luar negeri sebuah negara, dimana perilaku negara adalah produk atau hasil dari tekanan yang berasal dari sistem internasional yang ada (Waltz, 1979). Pada akhirnya Waltz menjelaskan bahwa negara-negara akan bertindak rasional untuk mencapai kepentingan nasional mereka dalam rangka survival dan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional.

Kondisi anarki ini juga membuat negara harus melakukan *self-help* dimana negara harus bisa melindungi dirinya dengan meningkatkan kapabilitas mereka, dimana seperti yang dijelaskan oleh Kenneth Waltz bahwa "negara-negara sangat berbeda hanya mengacu pada kapabilitas mereka yang sangat beragam, dan struktur suatu sistem berubah seiring dengan perubahan dalam distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem" (Waltz, 1979). Waltz dalam neorealisme menekankan bahwa kepentingan nasional bergerak seperti sinyal otomatis yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak, dimana para pemimpin negara secara otomatis akan selalu menjalankan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan oleh kepentingan negara. Maka berdasarkan penjabaran tersebut, kerjasama Inggris-Arab Saudi dalam penjualan senjata merupakan manifestasi dari upaya kedua negara untuk memaksimalkan kekuatan dan keamanan mereka dalam sistem internasional yang anarki, di mana Inggris berupaya mempertahankan posisi strategisnya sebagai kekuatan besar dan Arab Saudi berusaha memperkuat kapabilitas militernya untuk menghadapi ancaman regional.

Dalam kerangka neorealisme, aliansi dan kerjasama antara negara-negara tidak didasarkan pada norma atau ideologi, tetapi lebih pada kepentingan dan distribusi kekuatan. Seperti yang dijelaskan Waltz bahwa kerjasama dilakukan atas dasar *self-interest* yang digunakan untuk tujuan survival negara-negara tersebut. Pada keadaan ini, kerjasama Inggris dan Arab Saudi dalam penjualan senjata menunjukkan bagaimana kedua negara membangun hubungan berdasarkan kepentingan pragmatis, yaitu keuntungan ekonomi dan strategis bagi Inggris, serta peningkatan kapabilitas pertahanan bagi Arab Saudi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Tengah yang penuh ketegangan.

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni konsep kerjasama internasional yang menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak dalam usahanya menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai tujuan bersama dengan berdasar pada asas saling menguntungkan. Kemudian konsep kerjasama pertahanan yang merupakan upaya kerja sama antara dua atau lebih negara dalam bidang pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pertahanan mereka, serta konsep kepentingan nasional yang mengacu pada tujuan dan cita-cita suatu negara dalam mencapai kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan negara, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai fenomena kerjasama penjualan senjata yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan keamanan dalam konteks sistem internasional yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam kerjasama Inggris-Arab Saudi dalam bidang penjualan senjata pada tahun 2017. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup penelaahan dokumen resmi seperti laporan SIPRI, publikasi

pemerintah Inggris dan Arab Saudi, lisensi ekspor senjata, serta literatur akademik yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme yang bertujuan menggali makna dan interpretasi mendalam terhadap dinamika kerjasama kedua negara dalam konteks perdagangan senjata dan keamanan internasional.

Sumber data utama terdiri dari laporan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), publikasi *UK Export Control Organisation*, dokumen *Standard Individual Export Licenses* (SIELS), laporan Amnesty International, jurnal ilmiah internasional tentang perdagangan senjata dan *Arms Trade Treaty* (ATT), serta basis data elektronik terpercaya dari lembaga-lembaga penelitian internasional. Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi antar sumber data dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang independen dan kredibel, termasuk cross-checking antara data pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kerjasama penjualan senjata dan implikasinya terhadap ATT), penyajian data (menyusun temuan dalam bentuk naratif dan tematik mengenai pola kerjasama dan kontroversial yang muncul), dan penarikan kesimpulan (menafsirkan motivasi kedua negara serta dampaknya terhadap kepatuhan hukum internasional). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil analisis bersifat mendalam dan akurat dalam menjelaskan kompleksitas kerjasama pertahanan bilateral dalam konteks sistem internasional yang anarki.

PEMBAHASAN

Pasca-Arab *Spring*, dinamika keamanan di Timur Tengah mengalami perubahan signifikan, terutama di Yaman yang terjebak dalam konflik berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok Houthi. Arab Saudi, sebagai kekuatan regional utama, memandang perkembangan ini sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas domestiknya dan keseimbangan kekuatan kawasan. Dukungan Iran terhadap Houthi semakin memperkuat persepsi ancaman tersebut. Dalam kondisi ini, memperkuat kapabilitas militer menjadi prioritas strategis bagi Arab Saudi. Salah satu cara yang ditempuh adalah memperdalam kerjasama pertahanan dengan Inggris, mitra lama yang memiliki reputasi sebagai pemasok alutsista canggih.

Sejak 2014, hubungan kedua negara di bidang industri pertahanan memasuki fase intensifikasi. Inggris, yang pada saat itu mulai bersiap menghadapi tantangan ekonomi pasca-Brexit, melihat Arab Saudi sebagai pasar strategis yang mampu menyerap produk-produk pertahanan dalam skala besar. Program-program besar seperti pengadaan 72 jet tempur Typhoon Eurofighter melalui Program Al-Salam, pembelian bom Paveway IV, serta modernisasi sistem komunikasi pertahanan SANGCOM menjadi simbol keterikatan strategis kedua negara (Fachriana, 2021). Tidak hanya menjual, Inggris juga menyediakan pelatihan personel, dukungan teknis, dan pemeliharaan sistem persenjataan yang memastikan ketergantungan Arab Saudi terhadap teknologi dan layanan militer Inggris tetap tinggi.

Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi bagi Inggris, tetapi juga mengukuhkan perannya di kawasan Teluk. Dengan mempertahankan hubungan erat dengan Arab Saudi, Inggris memperoleh akses diplomatik dan strategis yang penting, termasuk dalam isu-isu energi dan keamanan maritim. Sebaliknya, bagi Arab Saudi, aliansi dengan Inggris

memberi legitimasi internasional atas kebijakan keamanan dan operasi militernya, sekaligus meningkatkan daya tawar terhadap rival-rival regionalnya.

Namun, sejak Maret 2015, ketika Arab Saudi memimpin koalisi militer dalam Operasi Decisive Storm untuk memerangi Houthi di Yaman, kerjasama ini menjadi sorotan internasional. Serangan udara koalisi seringkali menimbulkan korban sipil dan menghancurkan infrastruktur vital. Laporan dari organisasi HAM seperti Amnesty International dan *Human Rights Watch* menyebutkan adanya penggunaan senjata buatan Inggris dalam serangan tersebut (Voa Indonesia, 2017). Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan Inggris terhadap kewajiban internasionalnya, khususnya setelah meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) pada 2014.

ATT mengharuskan negara pengekspor senjata untuk menilai risiko pelanggaran HAM atau hukum humaniter internasional sebelum memberikan lisensi ekspor. Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit melarang ekspor jika terdapat kemungkinan senjata tersebut digunakan untuk kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya. Namun, data menunjukkan bahwa lisensi ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi justru meningkat di tengah eskalasi konflik: dari 124 lisensi pada 2014 menjadi 165 pada 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan politik mungkin lebih dominan daripada pertimbangan kemanusiaan.

Pemerintah Inggris berulang kali membela kebijakan ini dengan alasan bahwa setiap transaksi dievaluasi secara ketat dan bahwa Arab Saudi memiliki mekanisme internal untuk meminimalkan korban sipil. Selain itu, Inggris menekankan bahwa hubungan pertahanan ini adalah bagian dari strategi diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan. Namun, argumen ini dipandang lemah oleh banyak pihak, mengingat bukti-bukti lapangan yang menunjukkan kerusakan luas akibat penggunaan senjata tersebut. Paradoks kebijakan Inggris semakin jelas ketika melihat bahwa di sisi lain, negara ini adalah salah satu penyumbang bantuan kemanusiaan terbesar untuk Yaman. Hingga 2016, Inggris telah mengalokasikan £139 juta untuk bantuan kemanusiaan, termasuk program *Yemeni Youth in Conflict Resolution and Prevention* yang mendorong partisipasi pemuda dalam proses perdamaian. Inggris juga aktif di forum internasional untuk mendorong resolusi konflik secara damai. Namun, upaya kemanusiaan ini berjalan berdampingan dengan ekspor senjata yang memicu kritik keras dari komunitas internasional.

Kondisi ini mencerminkan dilema klasik dalam hubungan internasional: di satu sisi, kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi memberikan keuntungan strategis, ekonomi, dan politik yang signifikan; di sisi lain, keberlanjutan ekspor senjata ke negara yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan catatan pelanggaran HAM menantang kredibilitas komitmen Inggris terhadap norma-norma internasional. Bagi Arab Saudi, kerjasama ini tetap vital karena tidak hanya memperkuat pertahanan militer, tetapi juga mendukung agenda politiknya di kawasan, khususnya dalam menahan pengaruh Iran. Bagi Inggris, hubungan ini adalah contoh nyata bagaimana kepentingan nasional seringkali memaksa negara untuk mengambil posisi yang pragmatis meskipun berisiko secara moral dan reputasi internasional.

Selain menjadi pemasok utama persenjataan, Inggris memegang peran strategis dalam proses modernisasi militer Arab Saudi. Transfer teknologi yang disertakan dalam kontrak pengadaan menciptakan hubungan ketergantungan jangka panjang, di mana pemeliharaan, pembaruan sistem, dan pelatihan teknis terus dilakukan oleh tenaga ahli dari perusahaan-perusahaan pertahanan Inggris seperti BAE Systems. Skema ini tidak hanya memastikan kelangsungan hubungan dagang, tetapi juga memperkuat posisi Inggris sebagai mitra yang sulit tergantikan.

Bagi Arab Saudi, keberlanjutan kerjasama ini adalah bagian dari strategi pertahanan jangka panjang yang sejalan dengan doktrin keamanan nasionalnya. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan pusat-pusat konflik di Timur Tengah, seperti Irak dan Yaman, serta berhadapan dengan rival strategis seperti Iran, Arab Saudi menempatkan modernisasi militer sebagai prioritas utama. Dukungan dari Inggris memberikan keunggulan teknologi yang dibutuhkan, khususnya dalam operasi udara yang menjadi tulang punggung strategi militernya.

Di tingkat kebijakan, hubungan ini didorong oleh kepentingan politik kedua belah pihak. Inggris melihat Arab Saudi sebagai mitra penting dalam upaya menjaga stabilitas harga energi global, mengingat peran Saudi sebagai eksportir minyak terbesar dunia (Kartal, 2022). Keamanan jalur distribusi energi, khususnya di Selat Hormuz dan Laut Merah, juga menjadi alasan mengapa Inggris terus mempertahankan hubungan erat di bidang pertahanan. Dengan memiliki pengaruh terhadap kebijakan keamanan Saudi, Inggris secara tidak langsung ikut menjaga kelancaran perdagangan global yang berdampak pada perekonomian domestiknya (Burhani, 2017).

Namun, hubungan yang erat ini tidak lepas dari kritik internal di Inggris. Parlemen, media, dan organisasi masyarakat sipil menekan pemerintah untuk meninjau ulang lisensi ekspor senjata, terutama setelah laporan PBB menunjukkan tingginya korban sipil di Yaman akibat serangan udara koalisi. Meskipun Mahkamah Tinggi Inggris sempat memutuskan pada 2019 bahwa lisensi ekspor harus dihentikan sementara, pemerintah kembali melanjutkan penjualan dengan alasan tidak ditemukan risiko jelas dan serius bahwa senjata tersebut digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional. Keputusan ini memperlihatkan adanya interpretasi hukum yang longgar demi melindungi kepentingan strategis negara.

Dalam praktiknya, evaluasi lisensi ekspor senjata Inggris dilakukan melalui kriteria yang mencakup penilaian risiko terhadap hak asasi manusia, stabilitas kawasan, dan keamanan nasional. Namun, penilaian ini seringkali bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Hubungan dagang yang bernilai miliaran pound sterling, ditambah dengan peran Arab Saudi dalam melawan pengaruh Iran, menjadi alasan kuat bagi Inggris untuk melanjutkan ekspor meski risiko pelanggaran HAM cukup tinggi.

Sementara itu, bagi Arab Saudi, keberlanjutan pasokan senjata dari Inggris memungkinkan mereka mempertahankan kampanye militer di Yaman tanpa mengalami hambatan signifikan dari sisi logistik dan operasional. Dengan akses berkelanjutan terhadap suku cadang, peluru kendali, dan pembaruan sistem, operasi udara dapat terus dilakukan dalam skala besar. Hal ini menjadi faktor penentu dalam mempertahankan posisi tawar Saudi di meja perundingan.

Pengaruh hubungan ini juga terlihat pada forum-forum internasional. Inggris cenderung bersikap hati-hati dalam mengkritik kebijakan militer Arab Saudi, khususnya yang terkait dengan konflik Yaman. Dalam beberapa kesempatan, Inggris memilih mendorong dialog politik tanpa secara langsung menekan Saudi untuk menghentikan operasi militernya. Sikap ini berbeda dengan pendekatan terhadap negara lain yang terlibat dalam pelanggaran HAM, yang umumnya mendapat kecaman lebih keras.

Kerjasama ini menciptakan pola hubungan yang saling menguntungkan tetapi juga sarat risiko reputasi. Inggris mendapatkan keuntungan ekonomi dan pengaruh strategis, sedangkan Arab Saudi memperoleh dukungan militer yang vital bagi agendanya di kawasan. Namun, konsekuensi negatifnya adalah meningkatnya persepsi bahwa Inggris mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional demi keuntungan nasional. Di tengah meningkatnya kesadaran

publik global terhadap isu HAM, posisi seperti ini dapat melemahkan klaim moral Inggris dalam diplomasi internasional.

Lebih jauh lagi, kerjasama pertahanan ini juga menegaskan adanya perbedaan prioritas antara kepentingan normatif dan kepentingan material. Kepentingan normatif, seperti promosi HAM dan supremasi hukum, seringkali menjadi bagian dari retorika diplomasi Inggris, namun dalam kasus ini tidak menjadi faktor penentu kebijakan. Sebaliknya, kepentingan material berupa stabilitas ekonomi, posisi geopolitik, dan hubungan dagang justru menjadi pendorong utama keberlanjutan hubungan.

Bagi peneliti hubungan internasional, kasus Inggris-Arab Saudi ini menawarkan contoh konkret bagaimana teori neorealisme bekerja dalam praktik. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara cenderung memprioritaskan kelangsungan hidup dan kepentingan strategisnya, bahkan jika itu berarti mengorbankan komitmen terhadap norma internasional. Situasi ini juga menunjukkan bagaimana kerjasama internasional, termasuk di bidang pertahanan, tidak selalu mencerminkan kesamaan nilai, melainkan sering kali didorong oleh kebutuhan pragmatis untuk menjaga kekuatan dan pengaruh di tingkat global.

Selain faktor ekonomi dan keamanan, hubungan Inggris-Arab Saudi di sektor pertahanan juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik di kedua negara. Di Inggris, industri pertahanan memiliki posisi yang kuat dalam perekonomian, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, dan menjadi salah satu sektor unggulan dalam ekspor. Perusahaan seperti BAE Systems, Rolls-Royce, dan MBDA memiliki kontrak besar dengan Arab Saudi, yang nilainya mencapai miliaran pound setiap tahunnya. Keberlanjutan kontrak ini berarti keberlangsungan pekerjaan di sektor strategis tersebut, sehingga menjadi isu sensitif bagi pemerintah, khususnya di daerah-daerah industri. Di sisi Arab Saudi, pembelian alutsista dari Inggris merupakan bagian dari modernisasi militer yang lebih luas, sejalan dengan visi jangka panjang yang dicanangkan dalam Saudi Vision 2030. Modernisasi ini mencakup peningkatan kemampuan tempur, pembangunan industri pertahanan domestik, dan diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Namun, Inggris tetap menjadi salah satu mitra kunci karena memiliki pengalaman, teknologi, dan kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan militer Saudi.

Konflik di Yaman menjadi ujian utama bagi hubungan ini. Bagi Inggris, keterlibatan Saudi dalam konflik tersebut menimbulkan dilema antara mempertahankan hubungan strategis dan merespons tekanan internasional terkait isu kemanusiaan. Laporan dari Panel Ahli PBB secara konsisten menunjukkan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional oleh semua pihak dalam konflik, termasuk koalisi yang dipimpin Saudi. Temuan ini digunakan oleh kelompok advokasi di Inggris untuk menuntut penghentian ekspor senjata. Namun, pemerintah Inggris mengadopsi pendekatan yang berbeda. Alih-alih menghentikan seluruh penjualan, mereka memilih melakukan evaluasi kasus per kasus terhadap setiap lisensi ekspor, dengan dalih bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa senjata tertentu digunakan untuk melanggar hukum internasional. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mempertahankan hubungan ekonomi dan strategis sambil mengklaim bahwa mereka tetap mematuhi kewajiban hukum internasional. Dalam perundingan internasional, Inggris juga memanfaatkan hubungan dengan Arab Saudi untuk mendorong stabilitas di kawasan Teluk. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris memiliki kepentingan untuk menjaga akses diplomatik ke negara-negara kunci di kawasan. Hubungan pertahanan ini memperkuat posisi Inggris dalam memediasi atau mempengaruhi kebijakan keamanan regional, meskipun pengaruh tersebut tidak selalu digunakan untuk menekan Saudi menghentikan operasi militernya di Yaman.

Selain itu, Inggris memandang Arab Saudi sebagai mitra penting dalam memerangi terorisme dan ekstremisme. Kerjasama intelijen antara kedua negara telah berkontribusi pada pencegahan serangan di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hubungan ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Inggris enggan mengambil langkah yang dapat merusak kemitraan strategis tersebut, termasuk penghentian penjualan senjata. Di tingkat regional, kehadiran Inggris di pasar pertahanan Saudi juga memungkinkannya bersaing dengan pemasok utama lainnya seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Meskipun AS tetap menjadi pemasok terbesar, Inggris mampu mempertahankan pangsa pasar yang signifikan berkat hubungan historis, kualitas produk, dan dukungan purna jual yang komprehensif. Keunggulan ini sulit ditandingi oleh pesaing, sehingga memperkuat ketergantungan Saudi pada teknologi dan layanan Inggris.

Kritik terhadap kebijakan ini datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari lembaga internasional dan negara-negara sekutu. Beberapa anggota Uni Eropa menekan Inggris untuk mengadopsi kebijakan ekspor senjata yang lebih ketat, sejalan dengan posisi mereka yang lebih kritis terhadap Saudi. Namun, keluar dari Uni Eropa memberi Inggris kebebasan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perdagangan senjatanya, yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hubungan dengan mitra strategis seperti Arab Saudi.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan luar negeri berbasis nilai dan kebijakan luar negeri berbasis kepentingan. Di atas kertas, Inggris berkomitmen pada promosi HAM, supremasi hukum, dan penyelesaian konflik secara damai. Namun, dalam praktiknya, kepentingan ekonomi dan keamanan seringkali mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut. Kasus hubungan dengan Arab Saudi menjadi contoh konkret bagaimana sebuah negara menavigasi dilema ini di tengah tekanan global dan domestik.

Dari perspektif Arab Saudi, dukungan berkelanjutan dari Inggris memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kritik internasional. Selama memiliki dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris, Saudi dapat melanjutkan kebijakan militernya dengan risiko diplomatik yang lebih rendah. Dukungan ini juga memberi sinyal kepada rival regional bahwa Saudi memiliki aliansi kuat yang dapat diandalkan dalam situasi krisis. Kerjasama ini pada akhirnya membentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan tetapi juga kompleks. Inggris mendapatkan manfaat ekonomi dan politik yang signifikan, sementara Saudi memperoleh keunggulan militer dan legitimasi internasional. Namun, hubungan ini juga menciptakan ketergantungan timbal balik yang dapat membatasi fleksibilitas kebijakan kedua negara di masa depan, terutama jika terjadi perubahan drastis dalam opini publik atau konstelasi politik internasional.

Keberlanjutan hubungan pertahanan Inggris-Arab Saudi selama periode konflik Yaman menunjukkan bahwa kedua pihak menempatkan kepentingan strategis di atas tekanan moral dan reputasi internasional. Inggris terus memberikan dukungan teknis dan logistik bagi alutsista yang digunakan Saudi, bahkan ketika bukti-bukti pelanggaran HAM semakin banyak dilaporkan. Dari sisi Saudi, kelanjutan suplai senjata ini menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum kampanye militer dan memastikan bahwa kekuatan udaranya tetap beroperasi tanpa hambatan.

Meski demikian, hubungan ini bukan tanpa risiko politik. Di Inggris, muncul kekhawatiran bahwa keterlibatan tidak langsung dalam konflik Yaman dapat merusak citra negara sebagai pelopor hukum internasional dan HAM. Isu ini menjadi sorotan di media nasional, di mana beberapa laporan investigatif mengungkap detail kontrak senjata dan keterlibatan perusahaan Inggris di lapangan. Tekanan politik dari oposisi dan kelompok

advokasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi proses pemberian lisensi ekspor, namun hasilnya tetap terbatas karena alasan keamanan dan kerahasiaan industri.

Bagi Arab Saudi, meskipun dukungan Inggris sangat penting, mereka juga menyadari perlunya mengembangkan industri pertahanan domestik. Saudi Vision 2030 menargetkan setidaknya 50% pengadaan militer berasal dari produksi lokal pada 2030. Meskipun target ini ambisius, Inggris dapat memposisikan diri sebagai mitra transfer teknologi dan pelatihan, sehingga tetap relevan dalam strategi jangka panjang Saudi. Peran ini memberi peluang bagi Inggris untuk mempertahankan akses pasar meskipun Saudi mulai memproduksi lebih banyak peralatan sendiri. Dalam konteks hukum internasional, hubungan ini memunculkan diskusi akademik mengenai interpretasi kewajiban negara pengekspor senjata. Inggris berpegang pada interpretasi yang memperbolehkan ekspor selama tidak ada bukti “jelas dan serius” bahwa senjata akan digunakan untuk melanggar hukum humaniter. Namun, pendekatan ini dikritik karena menempatkan beban pembuktian terlalu tinggi, sehingga memungkinkan ekspor terus berlanjut meskipun risiko pelanggaran cukup besar.

Konflik Yaman sendiri menunjukkan sedikit tanda penyelesaian cepat, dengan perundingan damai yang berjalan lambat dan situasi kemanusiaan yang memburuk. Dalam kerangka ini, kerjasama pertahanan Inggris-Saudi cenderung akan berlanjut, kecuali jika terjadi perubahan besar dalam politik domestik Inggris atau muncul sanksi internasional yang memaksa. Selama kedua negara melihat manfaat strategis yang jelas, kemungkinan penghentian hubungan ini tetap rendah. Namun, ada potensi perubahan jika opini publik di Inggris semakin kuat menentang penjualan senjata ke Saudi. Pengaruh media, kampanye LSM, dan tekanan parlemen dapat memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan, seperti yang pernah terjadi pada penghentian sementara lisensi ekspor pada 2019. Perubahan kepemimpinan politik di Inggris juga dapat mempengaruhi sikap ini, terutama jika pemerintahan baru mengedepankan kebijakan luar negeri berbasis nilai yang lebih tegas.

Dari sudut pandang keamanan regional, kerjasama ini memperkuat posisi Saudi dalam menahan pengaruh Iran, yang tetap menjadi rival utama di Timur Tengah. Inggris, meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik, mendapatkan keuntungan strategis dengan memiliki mitra yang dominan di kawasan Teluk. Posisi ini dapat digunakan untuk menjaga kepentingan energi dan jalur perdagangan internasional yang vital. Secara keseluruhan, hubungan pertahanan Inggris-Arab Saudi pada periode konflik Yaman mencerminkan dinamika hubungan internasional yang kompleks, di mana kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik seringkali mengalahkan pertimbangan normatif. Inggris memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisinya di pasar senjata global dan mempertahankan pengaruh di Timur Tengah, sementara Saudi mendapatkan dukungan vital bagi strategi militernya.

Analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun ada tekanan moral dan reputasi, keputusan politik di kedua negara tetap berpihak pada keberlanjutan kerjasama. Dalam konteks teori hubungan internasional, kasus ini mendukung pandangan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara cenderung mengedepankan survival dan kepentingan nasional di atas komitmen terhadap norma internasional. Ke depan, hubungan ini kemungkinan akan terus bertahan, meskipun mungkin mengalami penyesuaian bentuk seiring perkembangan industri pertahanan Saudi dan perubahan konstelasi politik global. Inggris memiliki insentif untuk tetap terlibat, baik melalui penjualan senjata, transfer teknologi, maupun kerjasama pelatihan. Saudi, di sisi lain, akan terus membutuhkan mitra yang dapat memberikan teknologi canggih dan dukungan politik di tingkat internasional.

Dengan demikian, kerjasama pertahanan antara Inggris dan Arab Saudi bukan hanya sebatas transaksi jual beli senjata, tetapi merupakan sebuah aliansi strategis yang berlandaskan kepentingan timbal balik. Meskipun mendapat sorotan negatif dari komunitas internasional, hubungan ini tetap berlanjut karena kedua pihak menilai manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan biaya politik yang harus ditanggung. Dalam perspektif realis, situasi ini menjadi contoh nyata bagaimana negara mengelola hubungan luar negeri untuk memaksimalkan kekuatan dan keamanan di tengah lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan antara Inggris dan Arab Saudi pada periode 2014-2017 tidak semata-mata merupakan hubungan jual beli senjata, melainkan sebuah kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan kedua negara. Bagi Inggris, penjualan alutsista ke Arab Saudi menjadi sarana mempertahankan industri pertahanan, memperkuat posisi geopolitik di Timur Tengah, dan memastikan stabilitas jalur distribusi energi global. Sementara bagi Arab Saudi, dukungan militer Inggris merupakan bagian dari strategi modernisasi pertahanan dan peningkatan kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman regional, khususnya konflik di Yaman dan rivalitas dengan Iran. Meskipun kerjasama ini menuai kritik dan tekanan dari komunitas internasional terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, kedua negara tetap mempertahankannya karena manfaat strategis yang dirasakan dinilai jauh lebih besar daripada risiko reputasi yang harus ditanggung. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional kerap mengungguli komitmen normatif terhadap hukum internasional. Dalam perspektif neorealisme, hubungan ini mencerminkan upaya negara untuk memaksimalkan keamanan dan kekuatan di tengah sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana aliansi strategis menjadi instrumen penting untuk mempertahankan posisi dan pengaruh di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Berita

- Burhani, R. (2017, September 20). Inggris, Arab Saudi teken kesepakatan kerja sama militer. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/653637/inggris-arab-saudi-teken-kesepakatan-kerja-sama-militer>
- Hendrik, R. (2018, March 24). Amnesty International Kecam AS dan Inggris Jual Senjata ke Saudi. *Mina News*. <https://minanews.net/amnesty-international-kecam-as-dan-inggris-jual-senjata-ke-saudi/>
- Kartal, A. G. (2022, March 17). Inggris, Arab Saudi setuju kolaborasi jaga stabilitas di pasar energi. *AA News*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/inggris-arab-saudi-setuju-kolaborasi-jaga-stabilitas-di-pasar-energi/2537819>

Voa Indonesia. (2017, September 8). Human Rights Watch Tuntut Penyelidikan terhadap Serangan Udara di Yaman. *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/human-rights-watch-tuntut-penyelidikan-terhadap-serangan-udara-di-yaman/4020547.html>

Buku

Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*.

Skripsi

Fachriana, V. F. (2021). *Analisa Kebijakan Inggris Meningkatkan Kerjasama Penjualan Senjata Dengan Arab Saudi Terkait Konflik Yaman Tahun 2015-2017*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Broadcast

MOFA of Japan. (2014, September 26). *Statement by the Minister for Foreign Affairs of Japan on the Confirmation of the Entry into Force of the Arms Trade Treaty (ATT)* [Broadcast].